

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nganjuk yang dianalisis menggunakan model implementasi Edward III dengan 4 fokus, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk belum berhasil di karenakan factor Komunikasi dan Struktur Birokrasi.

2. Komunikasi

Komunikasi belum mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kota layak anak. Hal tersebut karena komunikasi belum dilakukan secara optimal dilihat dari transmisi, kejelasan dan konsistensi yang masih kurang, dibuktikan dengan adanya satu instansi yaitu Satuan Pamong Praja (Saptol PP) yang tidak memahami terkait kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk sehingga dapat menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Selain itu komunikasi kepada masyarakat terhadap kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk ini masih kurang menyeluruh, karena sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui ataupun memahami kebijakan tersebut.

3. Sumber Daya

Sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk telah cukup baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari ketersediaan sumber daya manusia (staff) dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki

kemampuan dalam melakukan tugas yang ada. Kebijakan KLA tersebut juga memiliki pedoman peraturan dan petunjuk teknis serta kewenangan yang dapat digunakan selama proses implementasi kebijakan tersebut. Selain itu terdapat fasilitas fisik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mendukung implementasi kebijakan KLA yaitu dengan penyediaan Bus Sekolah. Namun terdapat salah satu instansi yang memiliki program sendiri tanpa mengetahui program Kota Layak Anak yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk dengan memberikan pernyataan bahwa program yang disediakan hanya program internal instansi tanpa mengetahui tentang KLA.

#### 4. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa fokus disposisi dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pegawai yang memahami terkait kebijakan KLA dan melaksanakan berbagai program pendukung kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, tidak adanya resistensi atau penolakan dari para pelaksana serta adanya intensitas respon yang terus menerus dari petugas dalam melaksanakan kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk.

#### 5. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk belum terdapat struktur birokrasi yang jelas. Struktur organisasi hanya terdapat pada FANTASI sudah tercantum dalam SK. Bahkan juga terdapat SK gugus tugas dari setiap desa untuk mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Selain itu,

tidak terdapat pembagian kerja secara jelas dan tertulis meskipun setiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan tanggung jawab kerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan arahan dari pimpinan Satgas di tingkat desa saat pelaksanaan briefing berlangsung.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas. Maka peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam implementasi kebijakan KLA sehingga dapat berjalan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Adapun rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan KLA Pemerintah Kabupaten Nganjuk disarankan melakukan komunikasi dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat secara menyeluruh sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai secara maksimal.
2. Dalam memaksimalkan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk diperlukan adanya struktur birokrasi yang jelas. Hal tersebut guna pembagian tanggung jawab yang jelas dan meminimalisir tumpang tindih tanggung jawab dari pihak instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk.
3. Dalam mendukung implementasi kebijakan KLA yang maksimal di kabupaten Nganjuk diperlukan fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan keliling, dan penambahan bus sekolah.